

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Sumber Lain

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Baurens, Svetlana. 2010. *Valuation of Metal and Mining Companies*. Zurich: Basinvest. <http://ehrenworthsyne.com/casadeleon/Docs/ValuationofMining.pdf> (diakses 21 Maret 2016)
- Carter, William K dan Usry, Milton F. 2002. *Cost Accounting* Edisi 13. South Western: Cengage Learning.
- Creswell, John W. *Research Design: Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, Alexander., et. all. 2014. *Indonesian Coal Book 2014/2015*. Jakarta: Petromindo.
- Harjanto, Budi dan Wahyu Hidayati. 2003. *Konsep Dasar Penilaian Properti (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penilaian Properti Tujuan PBB*. Jakarta: PT Indeks.
- Internal Revenue Service, 2005. *Coal Excise Tax Audit Technique Guide (ATG)*. <https://www.irs.gov/pub/irs-mssp/coal.pdf> (diakses pada 21 Maret 2016).
- Judowinarso, Endarto. 2006. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah BPPK Departemen Keuangan RI.
- Kent, Calvin A. *Ad Valorem Taxation of Coal Property in West Virginia and Other States-Part 1*. Florida: International Association of Assessing Officer. [http://www.marshall.edu/cber/docs/2010\\_XX\\_XX\\_Kent-AdValoremTaxation-p1-2010.pdf](http://www.marshall.edu/cber/docs/2010_XX_XX_Kent-AdValoremTaxation-p1-2010.pdf) (diakses 21 Maret 2016).
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, 2015. *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia*. Jakarta: MAPPI
- Russel, Bill. 2000. *Income Taxation of Natural Resources (Volume:1)*. New York: Research Institute of America.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Heru. 2010. *Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Materai (Edisi Dua)*. Jakarta: Indeks.

Valero, Antonio., Oscar Carpintero, Alician Valero, Guiomar Calvo. 2014. *How to account for mineral depletion. The exergy and economic mineral balance of Spain as a case study*. Elsevier: Ecological Indicator. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14003306> (diakses 21 Maret 2016).

## **B. Dokumen Publik dan Peraturan Perundangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

\_\_\_\_\_, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 533 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOPI).

\_\_\_\_\_, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2014 tentang Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Areal *Offshore*, Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Dan Angka Kapitalisasi, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Panas Bumi, Dan Pertambangan Mineral Batubara Tahun Pajak 2014.

\_\_\_\_\_, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi Untuk Tubuh Bumi Eksplorasi, Angka Kapitalisasi, Harga Uap, dan Harga Listrik Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek PBB Sektor Pertambangan Tahun Pajak 2015.

\_\_\_\_\_, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 953.K/32/DJB/2015 tentang Biaya Produksi Untuk Penentuan Harga Dasar Batubara.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 515.K/32/DJB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 644.K/30/DJB/2013 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara.

\_\_\_\_\_, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. 2014. *Modul Biaya: Sektor Pertambangan Batubara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.